

## Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

Lilik Trianto<sup>1</sup>, Meiran Panggabean<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tanjungpura

Correspondence Email: [liliktrianto25@gmail.com](mailto:liliktrianto25@gmail.com) ABSTRAK

Info Artikel	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b> DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja</p>	<p>Tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis pengaruh langsung Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalbar. Bentuk penelitian kuantitatif-deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2012-2021. Alat analisis adalah regresi data panel dengan model analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian adalah DAU, DAK dan DBH secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.</p>
<p><b>Keywords:</b> GAF, SAF and PSF, Economic Growth and Employment Absorption.</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p>The research objective was to test and analyze the direct effect of the General Allocation Fund (GAF), the Special Allocation Fund (SAF) and the Revenue Sharing Fund (PSF) on economic growth and employment in the Province of West Kalimantan. Form of quantitative-descriptive research. The data used in this study is secondary data for 2012- 2021. The analysis tool is panel data regression with a path analysis model. The results of the study are that DAU, DAK and DBH partially and simultaneously have a significant effect on economic growth. DAU, DAK and DBH affect employment absorption through economic growth.</p>

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam proses pembangunan Kalimantan Barat selama periode 2012-2021 tampak ada kemajuan, terutama bila dilihat dari struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersifat fluktuatif pada kisaran -1,82% (terendah) pada tahun 2020 hingga 6,08% (tertinggi) pada tahun 2013. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat rata-rata 4,82%. Perbedaan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif juga terjadi di 14 kabupaten/kota. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang (5,20%) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten Kapuas Hulu (3,98%). Meskipun sepanjang tahun ekonomi tumbuh positif (kecuali di tahun 2020) dan cenderung meningkat, namun penyerapan tenaga kerja cenderung menurun dan tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dari 3,48% tahun 2012 menjadi 5,82% tahun 2021.

Mencermati pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di 14 Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Barat, terungkap adanya perbedaan. Kabupaten Ketapang yang rata-rata pertumbuhan ekonominya tertinggi (5,20%), ternyata penyerapan tenaga kerjanya rata-rata 1,50%, lebih rendah dibanding penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kapuas Hulu yang rata-rata pertumbuhan ekonominya terendah (3,98%) namun mampu menyerap tenaga kerjasebesar rata-rata 2,37%.

Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berbeda-beda antar kabupaten/kota dipengaruhi oleh ketersediaan jumlah dan kualitas sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan modal yang dimiliki masing-masing daerah. Modal yang

dimaksud di sini meliputi investasi swasta, investasi asing dan transfer ke daerah (TKD). Kebijakan TKD yang berdampak pada indikator pembangunan sosial dan perekonomian di daerah. Dukungan TKD pada aspek layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk membangun dan mempertahankan SDM daerah yang berkualitas di daerah agar lebih berdaya saing, terampil, inovatif, produktif, dan berkelanjutan dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya. Dana transfer dikenal dengan nama Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdiri dari: (1) Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik); (2) Dana Insentif Daerah (DID); (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan (4) Dana Desa. Pembahasan dalam studi tertuju pada pemanfaatan DAU, DAK dan DBH di 14 kabupaten/kota pembangunan daerah. Pemanfaatan DAU, DAK dan DBH di masing-masing Kabupaten/Kota memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, selama periode 2012-2021 Kabupaten Ketapang merupakan penerima DAU, DAK dan DBH terbesar, pertumbuhan ekonominya tertinggi (rata-rata 5,20%) namun pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya rendah (rata-rata 1,50%). Kabupaten Kayong Utara, penerima DAU terendah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,68% dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja rata-rata 2,50%. Kota Singkawang, penerima DAK terendah ditandai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja relative tinggi, masing-masing 4,79% dan 3,02%. Sementara itu, Kabupaten Mempawah penerima DBH terendah, diikuti dengan

pertumbuhan ekonomi tinggi (rata-rata 4.88%) namun pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sangat rendah (rata-rata 0.76%)

Harapan pemerintah dengan adanya Kebijakan TKD (seperti DAU, DAK dan DBH) ekonomi semakin bertumbuh untuk selanjutnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di 14 Kabupaten/kota selama periode 2012-2021 tidak sama atau bervariasi pada kisaran 3,98% hingga 5,20% untuk pertumbuhan ekonomi dan 0,76 hingga 3,02 untuk pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Dari kenyataan yang terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang variatif di berbagai Kabupaten/kota, menarik untuk diteliti bagaimana sesungguhnya pengaruh DAU, DAK dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Teori transfer fiskal seperti yang dikemukakan oleh Litvack, *et al* (1998) dalam Arham, Kamuli dan Payu (2018), bahwa desain transfer akan mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal karena akan berdampak pada efisiensi dan keadilan serta pemerataan pendistribusian barang publik. Menurut Rosen (2002), transfer fiskal terdiri atas *unconditional grant* (transfer tanpa syarat) dan *conditional grant* (transfer dengan syarat). *Unconditional grant* merupakan jenis transfer yang ditujukan guna menjamin pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehingga daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Contoh transfer tak bersyarat Indonesia adalah DBH dan DAU (Azwardi, 2007 dalam Hastuti 2018). *Conditional grant* merupakan jenis transfer khusus yang

diberikan kepada daerah untuk tujuan khusus atau membiayai kegiatan-kegiatan penting pemerintah pusat. Contoh transfer bersyarat di Indonesia adalah DAK (Azwardi, 2007 dalam Hastuti 2018).

Berdasarkan teori federalisme fiskal yang dikembangkan oleh Hayek, Musgrave dan Oates dalam Kresnandra (2016), dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah guna mengurus daerahnya sendiri yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Selanjutnya teori Oates (1972, 2011) dan Tiebout (1956) dalam Rustan (2013) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif dengan perekonomian.

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Ricardo dalam Jhingan (2016), bahwa faktor tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, dimana tenaga kerja sebagai faktor utama, di samping faktor modal yang dimiliki. Teori Neoklasik (Solow-Swan) dalam Arsyad (2015), pertumbuhan perekonomian tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan teori ekonomi, dimana strategi dalam memperbaiki tenaga kerja, pengangguran maupun kemiskinan yaitu dengan menciptakan perekonomian yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Perekonomian berkualitas mampu menyediakan kesempatan orang untuk bekerja yang lebih besar dengan menarik pihak investor untuk berinvestasi pada pembangunan padat tenaga kerja (Arsyad, 2015).

Berdasarkan teori Keynes (1883-1946) dalam Mulyadi (2003), perekonomian dilandasi pada kekuatan mekanisme pasar

akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*), sehingga semua sumber daya termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh (*full-employed*). Suparmoko dan Maria (2000) dalam Sinaga (2005) bahwa teori permintaan dan penawaran akan tenaga kerja secara prinsip berhubungan dengan tingkat upah, yaitu upah yang minta tinggi, maka jumlah tenaga kerja (lowongan kerja) yang diperlukan akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Todaro (2003) mengemukakan bahwa penyerapan tenaga kerja diartikan penerimaan orang yang bekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga dapat tergambar dengan jelas keadaan ketersediaan lowongan kerja yang akan diisi oleh pencari kerja.

### **Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

DAU memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota Kalbar, dengan DAU yang ditransfer pusat ke daerah maka dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah DAU yang ditransfer pusat ke daerah, maka daerah dapat melakukan pembangunan yang menjadi skala prioritas daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas. Hal ini sesuai teori transfer *unconditional grant* yaitu transfer tanpa syarat dan sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh Rizal (2021), Mamuka (2019), Arina (2019), Setyawan (2013), Sulaeman dan Silvia (2019), Dilliana (2019) dan Suharlina (2019) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hubungan DAU dan pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis penelitian seperti berikut.

H1: DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### **Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

DAK juga memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota Kalbar, dengan DAK yang ditransfer pusat ke daerah maka dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah DAK yang diterima daerah, maka daerah dapat melakukan pembangunan jangka panjang yang lebih baik lagi sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini sesuai teori transfer *conditional grant* yaitu transfer dengan syarat dan sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh Talangamin (2018), Mokokrowu (2020), Dilliana (2019), Arina (2019) dan Setyawan (2013) yang menyatakan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hubungan DAK dan pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis penelitian seperti berikut.

H<sub>2</sub>: DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### **Pengaruh DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

DBH memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota Kalbar, dengan DBH yang ditransfer pusat ke daerah maka dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar porsi yang diperoleh daerah penghasil maka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas. Hal ini sesuai teori transfer *unconditional grant* yaitu transfer tanpa syarat dan sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh Mokokrowu (2020), Dilliana (2019), Sulaeman dan Silvia (2019), menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hubungan DBH dan pertumbuhan ekonomi, maka hipotesis

penelitian seperti berikut.

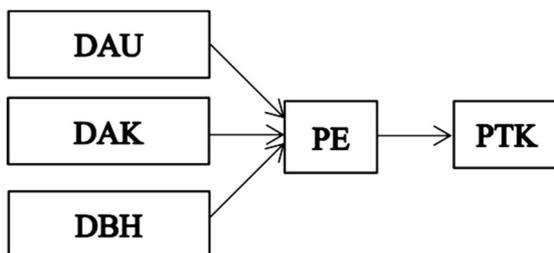
H<sub>3</sub>: DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### Pengaruh DAU, DAK dan DBH Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi.

DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan perekonomian yang berkualitas maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja atau menurunkan pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori *Okun* dan sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh Rusniati, Sudarti & Agustin (2018) dan Sari, Yulmardi & Bhakti (2016). Dari hubungan ini, maka hipotesis penelitian seperti berikut.

H<sub>4</sub>: DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

Secara konseptual, kerangka penelitian dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

### 3. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif dan waktu penelitian tahun 2012- 2021, menggunakan data sekunder dengan jenis data panel (gabungan *time series* dan *cross section*), serta alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*), persamaan struktural

menggunakan regresi data panel dengan spesifikasi model, yaitu:

$$\hat{Y}_{it1} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$\hat{Y}_{it2} = \alpha + \beta \hat{Y}_{it1} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Dimana:

- $\hat{Y}_{it1}$  = Pertumbuhan ekonomi
- $\hat{Y}_{it2}$  = Penyerapan tenaga kerja.
- $X_1$  = DAU
- $X_2$  = DAK
- $X_3$  = DBH
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien regresi
- $i$  = Kabupaten/Kota ke- $i$
- $t$  = Periode ke- $t$
- $\varepsilon$  = Standar error

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara lengkap hasil penelitian berupa:

#### Hasil Estimasi Regresi

Hasil estimasi regresi pada model I dengan pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) sebagai variabel *dependen* seperti berikut.

Tabel 1 Estimasi Regresi Model I

Variabel	Koefisien	Prob.
C	5,031	0,000
DAU ( $X_1$ )	0,452	0,000
DAK ( $X_2$ )	0,126	0,000
DBH ( $X_3$ )	0,074	0,000

Sumber: Hasil Estimasi Model Fixed Effect, Diolah (2022).

Berdasarkan hasil estimasi regresi model I, maka persamaan regresi yaitu:

$$PE_{it} = 5,031 + 0,452 DAU_{it} + 0,126 DAK_{it} + 0,074 DBH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Interpretasi dari nilai yang didapatkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Nilai tetapan estimasi regresi sebesar 5,031, dapat diartikan jika seluruh variabel bebas (DAU, DAK dan DBH) diasumsikan nol, maka nilai pertumbuhan ekonomi yang di refleksikan oleh logaritma PDRB sebesar 5,03%.
- b. Nilai tetapan variabel DAU sebesar 0,452,

hal ini dapat diartikan jika DAU meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya (DAK dan DBH) kita asumsikan konstan, maka pertumbuhan ekonomi diprediksikan meningkat sebesar 0,45%.

- c. Nilai koefisien variabel DAK adalah 0,126, hal ini dapat diartikan jika DAK meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya (DAU dan DBH) kita asumsikan konstan, maka pertumbuhan ekonomi diprediksikan meningkat sebesar 0,13%.
- d. Nilai koefisien DBH adalah 0,074, hal ini dapat diartikan jika DBH meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya (DAU dan DAK) kita asumsikan konstan, maka pertumbuhan ekonomi diprediksikan meningkat sebesar 0,07%.

Hasil estimasi regresi pada model II dengan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel *dependen*, seperti berikut.

Tabel 2. Estimasi Regresi Model II

Variable	Koefisien	Prob.
C	8,188	0,000
Pertumbuhan Ekonomi (Y <sub>1</sub> )	0,419	0,000

Sumber: Hasil Estimasi Model Fixed Effect, Diolah (2022).

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel *dependen*, maka model persamaan regresi yaitu:

$$\text{Penyerapan TK}_{it} = 8,188 + 0,419 \text{ PE}_{it} + e_{it}$$

Interpretasi dari persamaan yang telah didapatkan yaitu sebagai berikut.

Hasil uji parsial (Uji t) seperti berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Model I (Pertumbuhan Ekonomi)		Model II (Penyerapan TK)	
	t-statistic	Prob.	t-statistic	Prob.
Pert. Ekonomi (Y <sub>1</sub> )	-	-	10,502	0,000*
DAU (X <sub>1</sub> )	6,209	0,000*	-	-
DAK (X <sub>2</sub> )	8,681	0,000*	-	-
DBH (X <sub>3</sub> )	4,022	0,000*	-	-

\* = Signifikan pada  $\alpha = 0,05$  Sumber: Hasil Uji t, Diolah (2022).

- a. Nilai tetapan estimasi regresi sebesar 8,188, hal ini dapat diartikan jika seluruh variabel bebas (DAU, DAK dan DBH) kita asumsikan nol, maka penyerapan tenaga kerja akan bernilai sebesar 8,19%.
- b. Nilai tetapan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,419, hal ini dapat diartikan jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya (DAU, DAK dan DBH) kita asumsikan konstan, maka penyerapan tenaga kerja diprediksikan meningkat sebesar 0,42%.

### Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) seperti berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi	R-squared	Adjusted R-squared
Model I (Pertumbuhan Ekonomi)	0,990462	0,989221
Model II (Penyerapan Tenaga Kerja)	0,989217	0,988009

Sumber: Hasil Uji Koefisien Determinasi, Diolah (2022).

*Adjusted R-squared* model I menunjukkan seluruh variabel DAU, DAK dan DBH dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 98,92%. Pada model II menunjukkan pertumbuhan ekonomi (DAU, DAK dan DBH) menjelaskan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 98,80%.

Seluruh variabel DAU, DAK dan DBH pada model I  $< 0,05$ , yang menyatakan  $H_0$  ditolak, yang berarti DAU, DAK dan DBH secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (termasuk di dalamnya DAU, DAK, DBH) pada model II  $< 0,05$ , maka secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil uji simultan (Uji F) seperti

Hasil uji F kedua model  $< 0,05$ , maka seluruh variabel *independen* DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (termasuk DAU, DAK dan DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pembahasan dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

### Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar

DAU secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalbar, hal ini dikarenakan DAU termasuk jenis transfer *unconditional grant* artinya dalam penggunaannya bebas dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Prinsip DAU adalah *cathegorical equity*, yaitu seluruh warga negara berhak memperoleh layanan dasar, seperti

berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

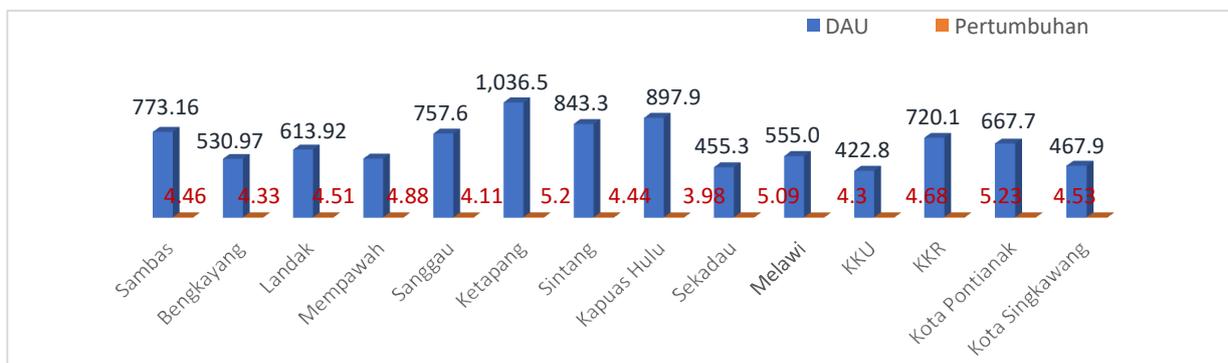
	F-statistic	Prob.
Model I (Pert. Ekonomi)	798,313	0,000*
Model II (Penyerapan TK)	819,076	0,000*

\* = Signifikan pada  $\alpha = 0,05$ . Sumber: Hasil Uji F, Diolah (2022).

pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur daerah. Dengan pengalokasian DAU yang optimal dapat pemeratakan kemampuan keuangan daerah guna membiayai pelayanan dasar yang sesuai standar minimum nasional (Darmadi, 2021).

Alokasi DAU yang relatif lebih besar dari dana transfer lainnya.

DAU tahun 2012-2021 yang tertinggi adalah Ketapang yakni Rp. 1,03 Triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5.20% (urutan ke-2), diikuti Kapuas Hulu sebesar Rp. 897,990 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi 3,98% (urutan ke-14) dan Sintang sebesar Rp. 843,320 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi 4,44% (urutan ke-10), sedangkan terendah adalah KKU yaitu Rp. 422,860 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi 4,68% (urutan ke-6). Berikut rata-rata DAU dan pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Kalbar tahun 2012 – 2021.



Gambar 2. Rata-Rata DAU dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2012 – 2021. Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).

Upaya yang harus dilakukan daerah dalam mendorong penerimaan DAU, antara lain dengan kematangan pengelolaan keuangan daerah dalam proses penentuan prioritas pembangunan dan eksekusi program menjadi kunci penting dalam meningkatkan DAU, daerah harus mampu mengelola keuangan dengan efisien dan tansferan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, pelaporan dan pertanggungjawaban DAU harus sesuai, penggunaan dana harus tepat sasaran yang menjadi skala prioritas daerah seperti meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, daerah harus meningkatkan kualitas pemanfaatan DAU dalam APBD.

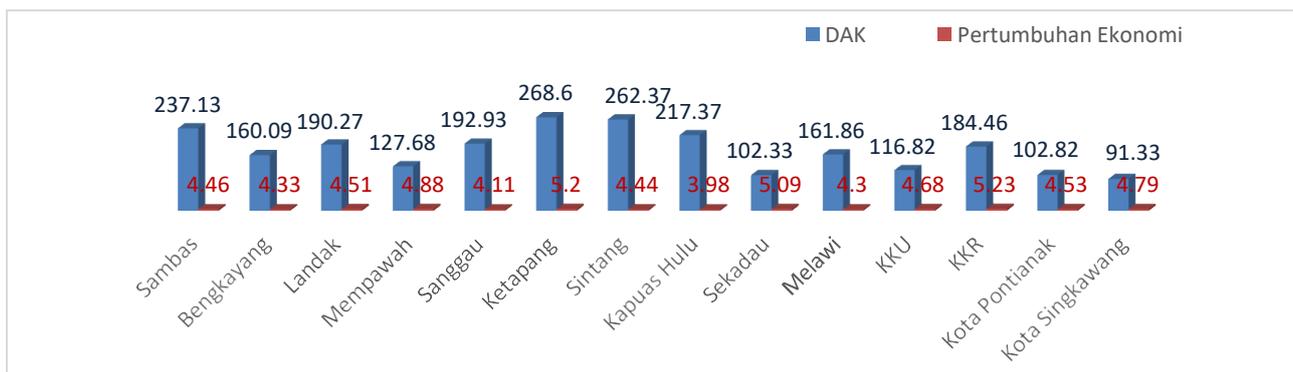
### Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar

Secara parsial dan simultan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalbar, hal ini didukung oleh penggunaan DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur

ekonomis yang lebih panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Mardiasmo, 2006). DAK dikategorikan *matching grant*, daerah wajib menyediakan sekurang-kurangnya 10% dana pendampingan. DAK dianggap sebagai penyelamat kualitas struktur belanja daerah melalui belanja barang dan modal karena jenis transfer ini menyasar langsung pada jenis pengeluaran yang lebih produktif.

DAK termasuk jenis transfer *conditional grant*, yaitu transfer yang diberikan ke daerah untuk tujuan khusus ataupun membiayai kegiatan-kegiatan penting pemerintah pusat. Ketapang penerima DAK tertinggi Rp. 268,60 Miliar (pertumbuhan ekonomi urutan ke-2), diikuti Sintang Rp. 262,37 Miliar (pertumbuhan ekonomi urutan ke-10) dan Sambas sebesar Rp. 237,13 Miliar (pertumbuhan ekonomi urutan ke-9), sedangkan Singkawang adalah penerima DAK terendah yakni Rp. 91,33 Miliar (pertumbuhan ekonominya urutan ke-5).

Berikut rata-rata DAK dan pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Kalbar tahun 2012 – 2021.



Gambar 3. Rata-Rata DAK dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2012 – 2021. Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).

Jumlah DAK yang diterima 14 kabupaten/kota di Kalbar terbesar pada tahun 2019 dengan rata-rata Rp. 263,325 Miliar, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian di Kalbar relatif stabil di angka 5,97%, sehingga diharapkan kegiatan investasi di daerah dapat meningkat yang didukung dengan infrastruktur yang baik, serta kegiatan-kegiatan prioritas pusat dapat terlaksana dengan baik.

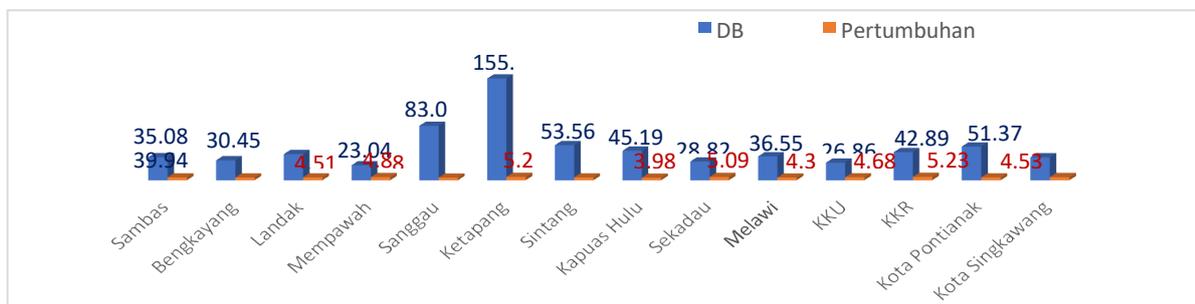
Kebijakan yang dianggap perlu dilaksanakan pemerintah dalam pengelolaan DAK, antara lain pemerintah pusat harus tepat dalam penghitungan kebutuhan DAK di daerah sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah dapat menetapkan rencana/program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan termuat dalam rencana kerja. Bagi daerah penerima DAK agar mempercepat penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan.

### Pengaruh DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar

DBH secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalbar, hal ini didukung berbagai faktor

seperti pembagian DBH berdasarkan prinsip *by origin* yaitu adanya rasa keadilan dan pemerataan sehingga menjadi motivasi bagi daerah untuk terus mengelola pajak dan non pajak. Prinsip transparansi dalam pengelolaan DBH, sehingga DBH ini benar-benar meningkatkan pembangunan/perekonomian daerah. Kebijakan yang tepat dalam mengelola DBH, dimana daerah diberikan kebebasan dalam mengelola DBH ini sesuai dengan prioritas daerah.

DBH termasuk jenis transfer *unconditional grant* yaitu daerah memiliki kebebasan penuh dalam membelanjakan dana sesuai prioritas daerah. Rata-rata DBH tertinggi Ketapang Rp. 155,30 Miliar (pertumbuhan ekonomi urutan ke-2), kemudian diikuti Sanggau Rp. 83,02 Miliar (pertumbuhan ekonomi ke-13) dan Sintang sebesar Rp. 53,56 Miliar (pertumbuhan ekonomi ke-10). DBH terendah Mempawah Rp. 23,04 Miliar (pertumbuhan ekonomi ke-4). DBH tertinggi pada tahun 2021 diperoleh Ketapang Rp. 412,82 Miliar dan terendah diterima Singkawang pada tahun 2019 Rp. 14,28 Miliar. Berikut rata-rata DBH dan pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota di Kalbar tahun 2012 – 2021.



Gambar 4. Rata-Rata DBH dan Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2012 – 2021. Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).

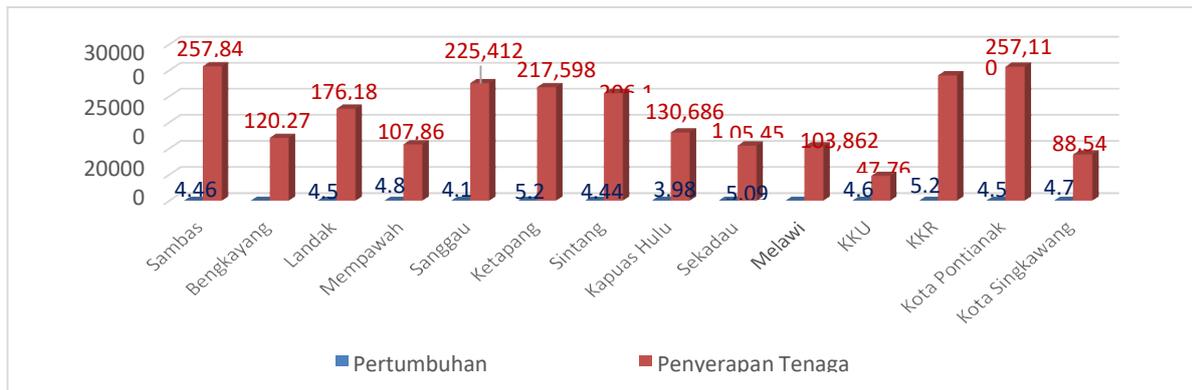
DBH diberikan pusat kepada daerah sesuai hasil dan realisasi penerimaan pada daerah itu, hal ini yang menyebabkan DBH setiap daerah berbeda. Pemerintah perlu mendorong daerah agar memaksimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak serta daerah harus lebih mengeksplor SDA. Melalui kebijakan ini diharapkan masing-masing daerah dapat memaksimalkan pendapat daerahnya agar DBH yang diperoleh semakin besar dan daerah dapat melaksanakan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas.

#### **Pengaruh DAU, DAK dan DBH Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalbar**

Pertumbuhan ekonomi (termasuk di dalamnya DAU, DAK dan DBH) secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. DAU, DAK dan DBH berpengaruh tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja 14 kabupaten/kota di Kalbar, namun DAU, DAK dan DBH ini berproses melalui  $\hat{Y}$  estimasi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang berkualitas biasanya diiringi dengan bertambahnya penyerapan tenaga kerja atau menurunkan pengangguran. Apabila ekonomi tumbuh, maka diperlukan jumlah tenaga kerja yang besar agar kapasitas output dapat tercapai. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan yang berpengaruh terhadap perekonomian yang berkualitas. Sesuai dengan teori *Okun*, dengan PDB naik 2%, maka dapat menyerap tenaga kerja serta menurunkan pengangguran 1% (Mankiw, 2007).

Berbagai kebijakan yang semestinya dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yaitu program perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menarik investor yang bersifat padat tenaga kerja dan memiliki nilai ekonomis dalam jangka waktu yang panjang. Program selanjutnya meningkat kualitas tenaga kerja dengan memberikan pelatihan secara rutin dan terpadu kepada calon tenaga kerja, sehingga tenaga kerja lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Rata-rata penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah Sambas yakni 257.486 jiwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46% atau urutan kesembilan, kemudian diikuti Kota Pontianak 257.110 jiwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.53% atau urutan ke-7. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terendah adalah KKU yaitu 47.768 jiwa dengan pertumbuhan ekonomi 4.68% atau di urutan keenam. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2020 di Sambas sebesar 282.246 jiwa dan yang terendah di KKU pada tahun 2017 sebesar 42.986 jiwa. Berikut data rata-rata pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 14 kabupaten/kota di Kalbar tahun 2012-2021.



Gambar 5. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2020–2021.

Sumber: BPS Kalbar, Diolah (2022).

Pertumbuhan ekonomi berkualitas di beberapa kabupaten/kota lainnya di Kalbar belum diringi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, semestinya dengan ekonomi yang berkualitas maka akan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Arsyad (2015), bahwa perekonomian berkualitas mampu menarik investor untuk berinvestasi padat tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerjamenjadi lebih besar.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah DAU, DAK dan DBH secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalbar, artinya dengan meningkatnya nilai DAU, DAK dan DBH yang ditransfer pemerintah pusat, maka dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di kabupaten/kota provinsi Kalbar.

DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi, dimana secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya dengan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas, maka dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota provinsi Kalbar.

### Rekomendasi

Pemerintah pusat perlu melihat kembali aturan/kebijakan terkait pengalokasian DAU, DAK dan DBH ke daerah terutama daerah yang miskin memperoleh dana transfer yang kecil. Bagi daerah jangan selalu tergantung kepada dana perimbangan, karena dikhawatirkan kapan daerah menjadi mandiri. Dana perimbangan ini benar-benar digunakan daerah untuk pembanguna daerah seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga perekonomian daerah menjadi lebih berkualitas.

### Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalbar mengalami kontraksi, sehingga hasil penelitian menjadi kurang baik. Kemudian keterbatasan lainnya adalah alokasi DAU, DAK dan BBH setiap tahunnya mengalami fluktuasi, sehingga tidak memberikan pengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arham, M. A., Kamuli, S., & Payu, B. R. (2018). *Kebijakan Fiskal (Transfer Dana Desa), Ketimpangan dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia*. Laporan Akhir Penelitian Berbasis Kompetensi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Arina, M. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, volume 20 (3). DOI: <https://doi.org/10.35794/jpekd.32796.20.3.2019>.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Darmadi, D. (2021). *Administrasi Keuangan Daerah*. Surabaya: PT. Cita Intrans Selaras (Citila).
- Dilliana, S. M. (2019). Regional Financial Performance Mediates the Effect of Regional Balance Funds and Expenditures on Economic Growth. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, volume 6 (6). <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.782>.
- Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN). Jawa Timur:UPN Veteran.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen volume 3 (2)*.
- Mamuka, K. K. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, volume 19 (03). dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25269/24963>.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, volume 2 (1).
- Mokorowu, L. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, volume 21 (04). DOI: [doi.org/10.35794/jpekd.32839.21.4.2020](https://doi.org/10.35794/jpekd.32839.21.4.2020).
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rizal, Y. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi

- Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, volume 5 (1).  
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jse>.
- Rosen, H. S. (2002). *Public Finance*. New York: McGraw - Hill.
- Rusniati, R., Sudarti & Agustin, A. F. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, volume 3 (2), 34–42. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7232>.
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta kaitannya dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, volume 9 (3). Kalimantan Timur: PKP2A III Lembaga Administrasi Negara. DOI: <https://doi.org/10.24258/jba.v9i3.124>.
- Sari, N., Yulmardi & Bhakti, A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, volume 5 (1). ISSN: 2303-1220 (online).
- Setyawan, H. B. (2013). Efektivitas TransferPusat Terhadap Perekonomian Provinsi Lampung. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, volume 6 (1). Diakses dari: <http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnal/bppk/article/view/73/20>.
- Sinaga, B. N. P. D. (2005). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Suharlina, H. (2019). Kemampuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Investasi dalam Menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Prosiding SATIESP*, volume 3, (3). ISBN: 978-602-53460-3-3.
- Sulaeman, A. S. dan Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi (JAA)*, volume 4 (1). DOI: <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>.
- Talangamin, O. B. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol. 19 (3). DOI: <https://doi.org/10.35794/jpekd.32741.19.3.2018>.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.